



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN**

T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format laporan disusun sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi yang terkandung dalam laporan ini merupakan aktualisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi berupa pencapaian kinerja sasaran strategis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Bahan Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025, diantaranya berasal dari dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja yang disusun/ diinformasikan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025. Dengan tersusunya LKjIP ini mudah-mudahan dapat memberikan umpan balik yang bermakna untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dimasa yang akan datang.

Sumohai, 18 Maret 2026



PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

AKSO BALINGGA, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19760320 200312 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025 secara keseluruhan realisasi anggaran mencapai Rp 150,836,220,145 atau 50,17% (unaudited) dari anggaran sebesar Rp 302,627,757,998.

Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dapat dikategorikan sangat baik dengan realisasi capaian kinerja program mencapai **99.01%**. Capaian kinerja per Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada Pendidikan Kabupaten Yahukimo, yaitu Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pendidikan, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15, Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD), Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP), Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik, Rasio murid/guru (SD), Rasio murid/guru (SMP), Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Rata-Rata Lama Sekolah, Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan.

Pencapaian kinerja Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025 merupakan upaya yang optimal dan secara konsisten dan akan ditingkatkan pencapaiannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.	7
1. Kedudukan dan Susunan Organisasi	7
2. Tugas Pokok dan Fungsi	9
E. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan	12
F. Isu Strategis	12
G. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	26
1. Tujuan dan Sasaran	29
2. Program, Kegiatan dan Pendanaan	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	33
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
1. Analisis Capaian Kinerja	34
2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative solusi yang telah dilakukan	39
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
4. Analisis Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran	47
C. Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	54
1. IKU Dinas Pendidikan 2021-2026	
2. RKT 2025	
3. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo.....	8
Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo.....	21
Gambar 2.1 Keterkaitan PJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo .	27
Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kinerja Prioritas Renstra Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo Tahun 2021-2026	28
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo Tahun 2025	30
Tabel 2.3 Anggaran (Pendanaan) Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo Tahun 2025	31
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pendekatan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	33
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran/ Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo Tahun 2025.....	35
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023 ..	36
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Sasaran/ Indikator Sampai Akhir Periode Renstra.....	36
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo Tahun 2025 ..	40
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	43
Tabel 3.7 Nilai Ingterval Efisiensi.....	44
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 3.9 Rekap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025	48
Tabel 3.10 Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Review atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategies Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Perjanjian Kinerja

(Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Hal tersebut sesuai dengan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah”.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo sebagai wujud untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang akan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
27. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 01).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo adalah sebagai sarana bagi Satuan Kerja dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang diberikan kepada Dinas Pendidikan. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong organisasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Yahukimo;
2. LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Yahukimo terhadap penyelenggara dan pelaksana satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

D. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo terdiri dari:

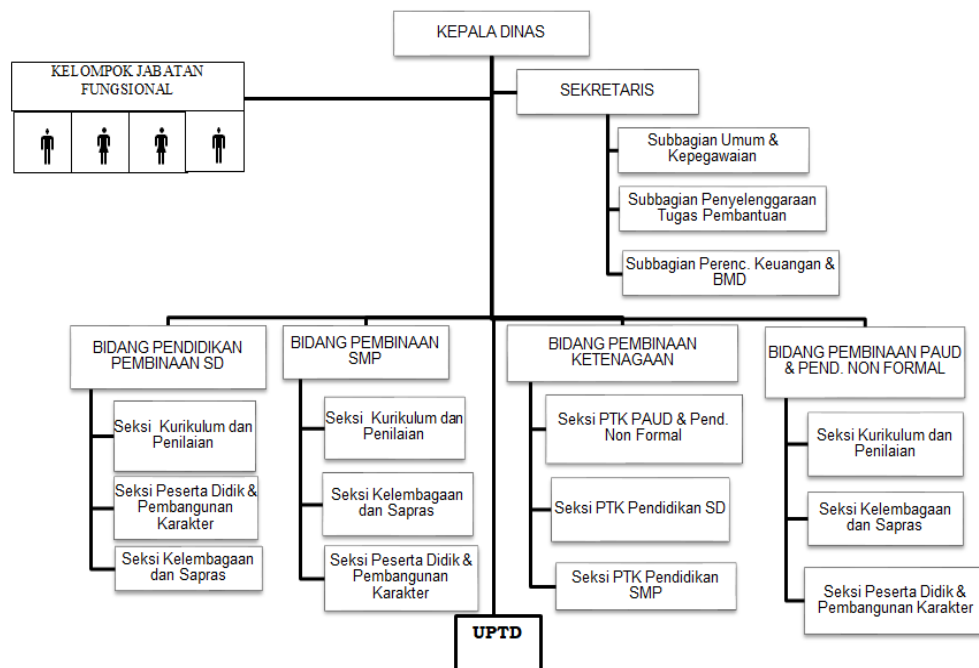
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan BMD;
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pend. Non formal, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 3. Seksi Kelembagaan dan Saprass
- d. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 3. Seksi Kelembagaan dan Saprass.
- e. Bidang Pembinaan SMP, terdiri atas:
 1. Sub Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 3. Seksi Kelembagaan dan Saprass.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
 1. Seksi PTK PAUD dan Pend. Non formal;
 2. Seksi PTK Pendidikan SD;
 3. Seksi PTK Pendidikan SMP.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum struktur organisasi Dinas Pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
YAHUKIMO



2. Tugas Pokok dan Fungsi

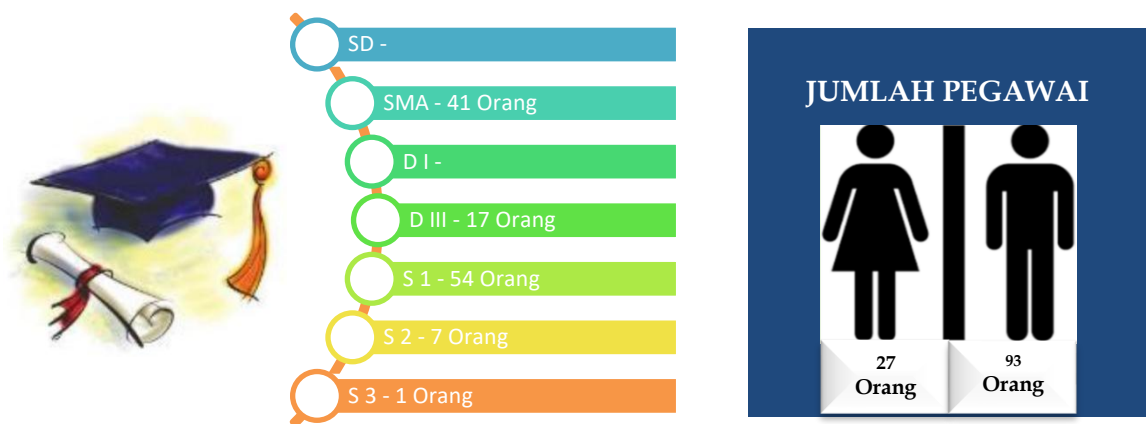
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

E. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENDIDIKAN

Berjalannya organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Pendidikan didukung oleh pegawai sebanyak 120 orang, dengan profil demografi berikut:

Gambar 1.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO



PEJABAT STRUKTURAL



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuranm Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja (*performance planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal dan harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo telah menyusun dokumen perencanaan yang relevan sebagai operasional dari perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo mengacu pada RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Yahukimo.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Yahukimo yang cerdas dan berkualitas serta punya daya saing yang kompetitif dan memiliki wawasan agribisnis dan agroindustri, serta memiliki kompetensi unggul secara kompetitif maupun komparatif sehingga mampu berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menjamin ketersediaan layanan pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan.
3. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang merata untuk jenjang pendidikan dasar.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar.

1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan
2. Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan melalui peningkatan angka rata-rata lama sekolah yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dan angka kelulusan guna menentukan pencapaian lulus atau tidaknya peserta didik tersebut dalam menyerap ilmu di tempat satuan pendidikannya.

3. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan.
4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, dengan melihat rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan presentase sekolah jenjang pendidikan dasar dengan kondisi baik.
5. Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru.
6. Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah, dengan melihat persentase perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD dan pendidikan menengah SMP dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut.
7. Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan (AM) berguna untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. Ada dua hal yang menyebabkan turun atau naiknya angka melanjutkan ini, yaitu siswa yang lulus jenjang pendidikan SD dan SMP tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan SMP ataupun SMA, dan siswa yang lulus jenjang pendidikan SD dan SMP melanjutkan pendidikannya di luar Kabupaten Yahukimo.
8. Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
9. Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru, hasil

perhitungan angka ini dapat digunakan untuk mengatuh rata-rata guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Jika rasio peserta didik terhadap guru tinggi, ini berarti satu orang pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan/ dilayani oleh seorang guru akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.

Tabel 2.1
Sasaran/ Indikator Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	-	CC (51)	CC (51)	CC (60)	B (65)	B (70)
2.	Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	-	100	100	100	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	-	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	74.60	75.26	75.74	76.19	76.50
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	-	105.07	104.49	103.90	103.32	111.11
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	-	102.04	102.61	103.17	103.75	104.32
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	-	99.42	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/PaketB	-	96.93	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	-	99.42	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	-	100	100	100	100	100

4.	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	-	60.46	60.50	60.52	60.57	60.61
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	-	63.60	63.65	63.71	63.73	63.78
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	-	88.01	90.60	92.59	94.26	95.65
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	-	88.95	91.72	93.74	95.65	96.44
5.	Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Rasio murid/guru (SD)	-	20	20	20	20	20
		Rasio murid/guru (SMP)	-	20	20	20	20	20
6.	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	-	0.28	0.19	0.13	0.07	0.02
7.	Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	-	91.99	93.31	94.19	95.17	95.79
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	97.81	97.99	98.17	98.35	98.37
8.	Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	100	100	100	100	100

2. Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan
Kab. Yahukimo Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	7.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		8.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		9.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		10.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
		11.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

No	Program	No	Kegiatan
		12.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		13.	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Yahukimo Anggaran Perubahan untuk Tahun 2025 sebesar Rp 302,627,757,998.

Tabel 2.3
Anggaran (Pendanaan) Dinas Pendidikan
Kab. Yahukimo Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		Rp90.381.859.000
	1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp326.470.000
	1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Rp89.461.859.000
	1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp130.000.000
	1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp401.000.000
	1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp20.000.000
	1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp42.530.000

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran
2.	Program Pengelolaan Pendidikan		Rp192.822.482.486
	2.1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp110.288.153.312
	2.2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp28.933.769.516
	2.3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp8.403.927.114
	2.4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp5.090.506.000
	2.5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rp20.574.199.344
	2.6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp3.281.927.200
	2.7	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Rp16.250.000.000
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Rp19.200.000.000
	3.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp19.200.000.000

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran dapat dilihat pada lampiran LKJiP Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam mencapai target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pendekatan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	> 90 s/d 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 s/d 90	Memuaskan
3	BB	> 70 s/d 80	Sangat Baik
4	B	> 60 s/d 70	Baik
5	CC	> 50 s/d 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 s/d 50	Kurang
7	D	> 0 s/d 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah:

Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi Capaiannya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah capaiannya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo tahun 2025 didapatkan dari perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan realisasinya.

1. Analisa Capaian Kinerja

Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 8 sasaran dan 21 indikator Kinerja. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2025.

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran/ Indikator Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Yahukimo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	65 (B)		
2.	Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%

		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76.19%	49,49%	64,96
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103.32%	103,32%	320,60%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	103.75%	13,82%	13.32%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	3,66%	3,66%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	5,10%	5,10%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	100%	326,77%	326,77%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	100%	127,74%	127,74%
4.	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	60.57%	100,30	165,7%
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	63.73%	49,68	77,95%
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94.26%	67,78%	71,90%
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95.65%	39,13%	40,91%
5.	Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Rasio murid/guru (SD)	1 : 20	1 : 101	19,80%
		Rasio murid/guru (SMP)	1 : 20	1 : 60	33,33%
6.	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.10%	3,42%	2,92%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.07%	3,19%	2,19%
7.	Tercapaiannya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95.17%	85,1%	89,4%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98.35%	100,84%	102,53%
8.	Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100	43,26%	43,26%

Sumber Data : Data Laporan Capaian Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah 8 (delapan) capaian sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo rata rata mencapai **99,01%** dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Dengan demikian maka secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pendidikan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, berikut disajikan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS
PENDIDIKAN**

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

MENINGKATNYA Indikator Kinerja Utama PENDIDIKAN	AKUNTABILITAS Satuan	Target	KINERJA Realisasi	DINAS Capaian %
Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Predikat/ Nilai	B/65	Menunggu LHE	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, Nilai evaluasi SAKIP OPD meningkat dari target **60 (CC)** menjadi **60,20 (B)**. Meskipun kenaikannya kecil, perubahan predikat dari **CC ke B** menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja. Dengan capaian **100,33%**, realisasi telah sedikit melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan berhasil mencapai bahkan sedikit melampaui ekspektasi kinerja yang telah direncanakan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2024) disajikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	
		Th. 2024	Th. 2025
Nilai Evaluasi SAKIP OPD	CC/60	B/60,20	

Dalam mencapai sasaran “meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan”, Dinas Pendidikan pada Tahun 2025 telah melakukan pembenahan internal sehingga ada peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2021 - 2026) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Terget Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Nilai Evaluasi SAKIP OPD	65/ B	60,20 / B		▲1,05

Perkembangan dari tahun 2024 ke 2025 menunjukkan adanya peningkatan dalam nilai evaluasi SAKIP OPD. Nilai yang sebelumnya berada pada angka **60,20 (B) di tahun 2024 meningkat menjadi 60,20 (B) pada tahun 2025, dengan kenaikan sebesar 1,05 poin**. Perubahan ini juga diiringi dengan peningkatan predikat dari **CC menjadi B**, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja OPD, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja.

Dalam upaya mencapai target akhir Renstra 2026, masih diperlukan peningkatan sebesar **4,80 poin** untuk mencapai nilai **65 (B)**. Jika tren kenaikan tahunan sebesar **+1,05 poin** dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, maka target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dicapai dalam waktu

dua tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan konsistensi peningkatan nilai evaluasi SAKIP melalui penguatan sistem tata kelola kinerja, monitoring yang lebih ketat, serta optimalisasi implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD.

4. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.8
Analisa Penyebab Keberhasilan dan Alternatif
Yang telah dilakukan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisa Penyebab
Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B/65		<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah adanya komitmen Pimpinan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2025 pada semua jabatan manajerial; 2. Telah adanya Tim Sakip Dinas Pendidikan dengan SK Kepala Dinas yang bertugas menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025; 3. Pelaksanaan Coaching Clinic SAKIP oleh Bagian organisasi telah membantu dalam memberikan informasi terkait SAKIP kepada Aparatur Dinas Pendidikan; 4. Pendampingan yang intens oleh Bagian Organisasi Setda dan Tim Sakip Kabupaten dalam mendampingi penyusunan laporan kinerja;
Alternative Solusi yang telah dilakukan			
TIM Sakip Dinas Pendidikan yang telah terbentuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi pada TIM Sakip Kabupaten			

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi terhadap penyerapan anggaran belanja langsung dalam mengukur capaian kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian
1.	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B/65			326.470.000		

Untuk pencapaian tingkat efisiensi sumber daya pada Indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Nilai	Tingkat Efisiensi
1.	Nilai Evaluasi SAKIP OPD		100%		Efisien

Dari uraian sebagaimana tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan capaian kinerja dengan indicator Nilai Evaluasi SAKIP OPD 100,33% dan penyerapan anggaran 100%, dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran adalah sangat efisien dengan nilai 100,33%.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B/65		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan:

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
--	--	--	---

Dinas Pendidikan, telah melakukan upaya perbaikan akuntabilitas kinerja dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

**SASARAN STRATEGIS 2
PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KOMPETENSI PESERTA
DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

:

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100%	100%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, Indikator Kinerja Utama :

- a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2025 ditargetkan 100%, dengan realisasi 100%. Formula perhitungannya adalah :

$$\frac{\Sigma \text{lulusan siswa SD/MI}}{\Sigma \text{siswa SD/MI yang ikut ujian}} \times 100\%$$

$$\frac{5.249}{5.249} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini menunjukkan capaian 100% dengan interperetasi tergolong sangat memuaskan.

- b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs pada tahun 2025 ditargetkan 100%, dengan realisasi 100%. Formula perhitungannya adalah :

$$\frac{\Sigma \text{ lulusan siswa SMP/MTs}}{\Sigma \text{ siswa SMP/MTs yang ikut ujian}} \times 100\%$$

$$\frac{1.067 \text{ Siswa}}{1.067 \text{ Siswa}} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini menunjukkan capaian 100% dengan interpretasi tergolong sangat memuaskan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2023) disajikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	
		Th. 2024	Th. 2025
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%

Dalam mencapai sasaran “Pengembangan Kualitas Dan Kompetensi Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan” dengan Indikator Kinerja Utama Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, adanya kesamaan realisasi dengan tahun 2023 dengan capain 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2021 - 2026) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%

Dengan adanya penurunan realisasi pada tahun ini, Dinas Pendidikan akan tetap selalu berupaya kembali meningkatkan realisasi yang telah ditentukan hingga mencapai target akhir renstra 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam mencapai 100% Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan bahwa seluruh peserta didik yang mengikuti ujian telah berhasil menyelesaikan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan ini meliputi:

a. Kualitas Pembelajaran yang Meningkat

Peningkatan Kompetensi Guru: Pelatihan dan workshop bagi guru dalam metode pembelajaran inovatif.

Penguatan Kurikulum:

- Implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis proyek.
- Adaptasi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kondisi daerah.

b. Ketersediaan dan Aksesibilitas Sarana-Prasarana

- Fasilitas Belajar yang Memadai: tersedianya ruang kelas yang cukup dan fasilitas penunjang seperti perpustakaan serta penyediaan buku ajar dan modul pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.
- Peningkatan Infrastruktur Sekolah: Pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang meningkatkan kenyamanan belajar.

c. Kebijakan Pendidikan yang Mendukung

- Program Wajib Belajar 9 Tahun: Adanya kebijakan wajib belajar SD-SMP mendorong seluruh anak menyelesaikan pendidikan dasar.
- Bantuan Pendidikan dan Beasiswa:
 - Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu ketersediaan dana untuk operasional sekolah.

- Beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah

d. Pendampingan dan Motivasi Peserta Didik

- Bimbingan Belajar Tambahan: Program remedial dan pendampingan bagi siswa dengan nilai rendah.
- Dukungan Orang Tua dan Masyarakat:
 - Peran serta orang tua dalam mendukung pendidikan anak melalui komunikasi aktif dengan sekolah.
 - Program sekolah berbasis komunitas yang melibatkan

e. Evaluasi dan Monitoring yang Efektif

- Asesmen Berkala: Evaluasi berkala terhadap hasil belajar siswa sebelum menghadapi ujian kelulusan.
- Sistem Penjaminan Mutu Sekolah: Supervisi kepala sekolah dan pengawas dalam memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.

Kesimpulan

Capaian **100% Angka Kelulusan** ini bukan hanya hasil dari ujian akhir, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor seperti peningkatan kualitas pengajaran, fasilitas yang mendukung, kebijakan pendidikan yang tepat, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi terhadap penyerapan anggaran belanja langsung dalam mengukur capaian kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	500.000.000	500.000.000	100%
2.	Angka Kelulusan	100%	100%	100%	-	-	0%

	(AL) SMP/MTs						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Untuk pencapaian tingkat efisiensi sumber daya pada Indikator Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Nilai	Tingkat Efisiensi
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	Efisien
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	0%	0%	Tidak Efisien

Dari uraian sebagaimana tercantum pada tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dengan indikator Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs masing-masing telah mencapai 100%. Untuk indikator Angka Kelulusan (AL) SD/MI, capaian tersebut didukung oleh penyerapan anggaran sebesar 100%.

Sementara itu, pada indikator Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, meskipun capaian kinerja mencapai 100%, namun tidak terdapat penyerapan anggaran (0%) pada tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, kondisi ini menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0%, sehingga secara perhitungan dikategorikan tidak efisien.

Capaian indikator ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kinerja tidak secara langsung didukung oleh alokasi anggaran pada program/kegiatan yang terukur dalam dokumen perencanaan tahun berjalan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyelarasan antara indikator kinerja dan penganggaran agar dukungan sumber daya dapat teridentifikasi secara lebih jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	

SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES
PENDIDIKAN DASAR DAN PAUD YANG BERMUTU DAN
BERKEADILAN

:

1. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025** **DINAS PENDIDIKAN**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	76,19	49,49%	64,96
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	%	103,32	103,32%	320,60%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	%	103,75	13,82%	13,32%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	3,66%	3,66%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100	5,10%	5,10%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	100	326,77%	326,77%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	%	100	127,74%	127,74%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, Indikator Kinerja Utama :

- a. **Pendidikan Anak Usia Dini**, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **76,19%**. Perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa PAUD}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 5 - 6 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah seluruh siswa PAUD sebanyak 2.106 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 4.255 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan:

$$\begin{aligned} & \frac{2.106}{4.255} \times 100\% \\ & = 49,49\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, realisasi indikator Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2025 adalah sebesar 49,49%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 76,19%, maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{40,49}{476,19} \times 100\% \\ & = 64,96\% \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 64,96%, sehingga realisasi indikator belum mencapai target yang ditetapkan dan masih memerlukan upaya peningkatan akses dan partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

- b. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A**, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **103,32%**. Perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa SD/MI/Paket A}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah seluruh siswa SD/MI/Paket A sebanyak 59.444 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 17.946 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{59.444}{17.946} \times 100\% \\ = 331,24\%$$

Dengan demikian, realisasi APK SD/MI/Paket A pada tahun 2025 adalah sebesar 331,24%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 103,32%, maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\frac{331,24}{103,32} \times 100\% \\ = 320,60\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 320,60%, sehingga realisasi indikator melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini dapat terjadi karena jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A tidak hanya berasal dari kelompok usia 7-12 tahun, tetapi juga mencakup siswa di luar kelompok usia tersebut, sehingga nilai APK dapat melebihi 100 persen.

- c. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B**, pada tahun 2025 ditargetkan 103,75% perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa SMP/MTs/Paket B}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah seluruh siswa SMP/MTs/Paket B sebanyak 12.790 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 92.559 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{12.790}{92.559} \times 100\% \\ = \mathbf{13,82\%}$$

Dengan demikian, realisasi APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2025 adalah sebesar 13,82%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 103,75%, maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\frac{13,82}{103,75} \times 100\% \\ = 13,32\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 13,32%, sehingga realisasi indikator belum mencapai target yang ditetapkan dan secara interpretasi tergolong sangat rendah.

- d. **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**, pada tahun 2025 ditargetkan 100%. Perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut::

$$\frac{\Sigma \text{siswa usia 7 – 12 tahun jenjang SD/MI/Paket A}}{\Sigma \text{Penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 657 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 17.946 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{657}{17.946} \times 100\% \\ = 3,66\%$$

Dengan demikian, realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2025 adalah sebesar 3,66%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\frac{3,66}{100} \times 100\% \\ = 3,66\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 3,66%, sehingga realisasi indikator masih sangat jauh dari target yang ditetapkan dan secara interpretasi tergolong sangat rendah.

- e. **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**, pada tahun 2025 ditargetkan 100%. Perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{siswa usia 13 – 15 tahun jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\Sigma \text{Penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 472 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 9.259 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{472}{9.259} \times 100\% \\ & = 5,10\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2025 adalah sebesar 5,10%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{5,10}{100} \times 100\% \\ & = 5,10\% \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 5,10%, sehingga realisasi indikator masih jauh dari target yang ditetapkan dan secara interpretasi tergolong sangat rendah.

- f. **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12**, pada tahun 2025 ditargetkan 100%. Perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa jenjang SD/MI}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah seluruh siswa jenjang SD/MI sebanyak 58.640 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 17.946 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{58.640}{17,946} \times 100\% \\ & = 326,77\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun pada tahun 2025 adalah sebesar 326,77%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{326,77}{100} \times 100\% \\ & = 326,77\% \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 326,77%, sehingga realisasi indikator melampaui target yang telah ditetapkan dan secara interpretasi tergolong sangat tinggi.

- g. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15**, pada tahun 2025 ditargetkan 100%. Perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa jenjang SMP/MTs}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah seluruh siswa jenjang SMP/MTs sebanyak 11.827 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 9.259 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{11.827}{9.259} \times 100\% \\ & = 127,74\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun pada tahun 2025 adalah sebesar 127,74%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\frac{127,74}{100} \times 100\% = 127,74\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 127,74%, sehingga realisasi indikator melampaui target yang telah ditetapkan dan secara interpretasi tergolong sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2024) disajikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi		Fluktuasi Kinerja
		Th. 2024	Th. 2025	
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76,19	54,12%	49,49%	-8,56% ▼
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	103,32	299,70%	103,32%	-65,52% ▼
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	103,75	119,80%	13,82%	-88,46% ▼
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	298,60%	3,66%	-98,77% ▼
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	115,40%	5,10%	-95,58% ▼
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	100	298,60%	326,77%	9,43% ▲
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	100	115,40%	127,74%	10,69% ▲

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2021 - 2026) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76.50%	49,49%	64,69%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	111.11%	103,32%	92,99%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	104.32%	13,82%	13,25%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	3,66%	3,66%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	5,10%	5,10%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	100%	326,77%	326,77%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	100%	127,74%	127,74%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator pendidikan hingga Tahun 2025 menunjukkan variasi tingkat kemajuan terhadap target akhir Renstra Tahun 2026. Beberapa indikator telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dengan tingkat kemajuan sebesar 326,77% dan APS usia 13-15 tahun sebesar 127,74%.

Sementara itu, indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A telah mencapai 92,99% dari target akhir Renstra, sehingga secara umum menunjukkan progres yang cukup baik menuju target tahun 2026. Namun demikian, beberapa indikator seperti APK SMP/MTs/Paket B, APM SD/MI/Paket A, dan APM SMP/MTs/Paket B masih menunjukkan tingkat kemajuan yang relatif rendah dibandingkan dengan target akhir Renstra.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akan terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan capaian indikator yang masih rendah melalui optimalisasi program dan kegiatan pendidikan, sehingga target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 dapat tercapai secara maksimal.

4. Analisis Penyebab Pencapaian dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 terhadap indikator kinerja pada sektor pendidikan, terdapat beberapa indikator yang

menunjukkan capaian tinggi bahkan melampaui target, serta beberapa indikator lainnya yang masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Capaian yang tinggi pada beberapa indikator seperti **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** dan **Angka Partisipasi Kasar (APK)** disebabkan oleh tingginya jumlah peserta didik yang tercatat pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang menjadi pembaginya dalam formula perhitungan indikator. Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh adanya peserta didik yang berasal dari kelompok usia di luar rentang usia ideal, namun tetap tercatat sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu.

Sementara itu, beberapa indikator seperti **Angka Partisipasi Murni (APM)** menunjukkan capaian yang relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah peserta didik yang berada pada usia sekolah sesuai jenjang pendidikan, faktor geografis wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa wilayah, serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi validitas data kependudukan maupun data pendidikan.

Selain itu, perbedaan sumber data antara data pendidikan dan data kependudukan juga dapat mempengaruhi hasil perhitungan indikator sehingga menghasilkan nilai capaian yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja pendidikan, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memastikan kesesuaian data penduduk usia sekolah.
2. Mendorong peningkatan akses dan partisipasi pendidikan melalui penguatan program wajib belajar serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan tenaga pendidik pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan pendidikan.
4. Melakukan pemutakhiran data pendidikan secara berkala melalui sistem pendataan pendidikan untuk memastikan akurasi data yang digunakan dalam pengukuran indikator kinerja.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan capaian indikator kinerja pada sektor pendidikan dapat semakin meningkat dan lebih mendekati target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi terhadap penyerapan anggaran belanja langsung dalam mengukur capaian kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76,19	49,49%	64,96%	6.903.927.114	6.903.927.114	100%
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,32	103,32%	320,60%	-	-	0%
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	103,75	13,82%	13,32%	-	-	0%
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	3,66%	3,66%	90.843.510.000	90.843.510.000	100%
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	5,10%	5,10%	25.279.051.800	25.279.051.800	100%

6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	100	326,77%	326,77%	-	-	0%
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	100	127,74%	127,74%	-	-	0%

Untuk pencapaian tingkat efisiensi sumber daya pada Indikator diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Nilai	Tingkat Efisiensi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	64,96	100%	-35,04%	Tidak Efisien
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	320,60%	0%	320,60%	Tidak dapat dihitung*
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	13,32%	0%	13,32%	Tidak dapat dihitung*
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	3,66%	100%	-96,34%	Tidak Efisien
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	5,10%	100%	-94,90%	Tidak Efisien
6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	326,77%	0%	326,77%	Tidak dapat dihitung*
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	127,74%	0%	127,74%	Tidak dapat dihitung*

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator kinerja menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah atau **tidak efisien**. Hal ini terlihat dari perbandingan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang belum sebanding. Pada beberapa indikator, capaian kinerja masih rendah meskipun tingkat penyerapan anggaran telah mencapai 100%, sementara pada indikator lainnya tidak terdapat alokasi anggaran secara

langsung sehingga tingkat efisiensinya tidak dapat dihitung secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh penggunaan anggaran, tetapi juga oleh faktor lain seperti ketersediaan data, kondisi wilayah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76,19	49,49%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	103,32	103,32%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket tB	103,75	13,82%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	3,66%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket tB	100	5,10%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	100	326,77%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	100	127,74%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

**SASARAN STRATEGIS 4
TERCAPAINYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN**

1. **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	rasio	60,57	100,30	165,7%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	%	63,73%	49,68	77,95%
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,26%	67,78%	71,90%
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	95,65%	39,13%	40,91%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, Indikator Kinerja Utama :

- a. **Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)**, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60,57 dengan realisasi sebesar 100,30. Perhitungan indikator ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$(\Sigma \text{ sekolah dasar})/(\Sigma \text{ penduduk usia pendidikan SD}) \times 10.000$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah sekolah dasar sebanyak 180 sekolah dan jumlah penduduk usia pendidikan SD sebanyak 17.946 jiwa, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$180/17.946 \times 10.000 = 100,30$$

Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah:

$$100,30/60,57 \times 100\% = 165,7$$

Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah dasar terhadap penduduk usia sekolah telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kabupaten Yahukimo yang memiliki sebaran permukiman yang terpencar serta kondisi geografis yang

cukup sulit dijangkau, sehingga penyediaan sekolah dasar dilakukan hingga ke wilayah kampung untuk menjamin akses pendidikan bagi anak usia sekolah.

- b. **Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)**, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **63,73** dengan realisasi sebesar **49,68**. Perhitungan indikator ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$(\Sigma \text{ SMP}) / (\Sigma \text{ Penduduk usia pendidikan SMP}) \times 10.000$$

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah sekolah **SMP sebanyak 46 sekolah** dan jumlah penduduk usia pendidikan SMP sebanyak **9.259 jiwa**, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$46 / 9.259 \times 10.000 = 49,6846$$

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah:

$$49,68 / 63,73 \times 100\% = 77,95\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP terhadap penduduk usia sekolah **belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan**, namun ketersediaan layanan pendidikan menengah pertama masih terus diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana pendidikan.

- c. **Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik**, pada tahun 2025 ditargetkan 94.26% dengan realisasi 67,78%. Formula perhitungannya adalah :

$$\frac{\Sigma \text{ SD/MI dengan kondisi baik}}{\Sigma \text{ SD/MI}} \times 100\%$$

$$\frac{122}{180} \times 100\%$$

$$= 67,78\%$$

Hal ini menunjukkan capaian 71,90%. yang dapat diinterpretasikan tergolong cukup/masih perlu peningkatan, karena belum mencapai target

yang telah ditetapkan, meskipun lebih dari separuh sekolah telah berada dalam kondisi bangunan yang baik.

- d. **Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik**, pada tahun 2025 ditargetkan 95.65% dengan realisasi 39,13%. Formula perhitungannya adalah :

$$\frac{\Sigma \text{ SMP/MTs dengan kondisi baik}}{\Sigma \text{ SMP/MTs}} \times 100\%$$

$$\frac{18}{46} \times 100\%$$

$$= 39,13\%$$

Hal ini menunjukkan capaian 40,91%, dengan interpretasi tergolong **kurang**, karena realisasi masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan dukungan program rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pada jenjang SMP/MTs guna mencapai standar pelayanan minimal yang diharapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2024) disajikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi		Fluktuasi Kinerja
		Th. 2024	Th. 2025	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	60,57%	1,51%	100,30	6.542,38% ▲
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	63,73%	0,54%	49,68	9.100,00% ▲
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,26%	73,18%	67,78%	-5,40% ▼
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95,65%	37,50%	39,13%	1,63% ▲

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan capaian kinerja pada beberapa indikator antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Indikator **rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah** baik pada jenjang SD maupun SMP menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan relatif lebih baik dalam mendukung akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah.

Sementara itu, pada indikator **kondisi bangunan sekolah**, terjadi penurunan pada persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik, sedangkan pada jenjang SMP/MTs menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pemeliharaan serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang lebih optimal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2021 - 2026) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	60.61%	100,30	165,49%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	63.78%	49,68	77,89%
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95.65%	67,78%	70,86%
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	96.44%	39,13%	40,57%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hingga Tahun 2025 capaian beberapa indikator kinerja telah menunjukkan kemajuan terhadap

target akhir Renstra Tahun 2026. Indikator **rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang SD** telah melampaui target akhir Renstra dengan tingkat kemajuan sebesar **165,49%**, yang menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan dasar relatif memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah.

Sementara itu, indikator **rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP** telah mencapai **77,89%** dari target akhir Renstra sehingga masih memerlukan peningkatan dalam penyediaan layanan pendidikan menengah pertama. Pada indikator **kondisi bangunan sekolah**, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs masih menunjukkan capaian di bawah target akhir Renstra, sehingga diperlukan upaya peningkatan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung kualitas layanan pendidikan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kabupaten Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian yang baik serta beberapa indikator yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator **rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang SD** menunjukkan capaian yang melampaui target. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dasar yang relatif cukup serta penyebaran sekolah hingga ke wilayah kampung guna menjamin akses pendidikan bagi anak usia sekolah.

Sementara itu, indikator **rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP** serta **kondisi bangunan sekolah dalam kategori baik** masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kondisi geografis wilayah Kabupaten Yahukimo yang cukup sulit dijangkau, serta masih adanya bangunan sekolah yang memerlukan rehabilitasi atau perbaikan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator yang belum optimal, Dinas Pendidikan terus melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, serta penguatan perencanaan pembangunan pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi terhadap penyerapan anggaran belanja langsung dalam mengukur capaian kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	60,57	100,30	165,7%	17.134.643.312	17.134.643.312	100%
2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	63,73	49,68	77,95%	563.000.000	563.000.000	100%
3.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,26%	67,78%	71,90%	860.000.000	860.000.000	100%
4.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95,65%	39,13%	40,91%	-	-	0%

Untuk pencapaian tingkat efisiensi sumber daya pada Indikator diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Nilai	Tingkat Efisiensi
1.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	165,7%	100%	65,7%	Efisien
2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	77,95%	100%	-22,05%	Kurang Efisien
3.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	71,90%	100%	-28,10%	Kurang Efisien
4.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	40,91%	0%	-	Tidak Efisien

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan variasi pada masing-masing indikator kinerja. Indikator rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang SD menunjukkan tingkat efisiensi yang baik karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang digunakan.

Sementara itu, indikator rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP serta kondisi bangunan sekolah SD/MI dalam kategori baik menunjukkan tingkat efisiensi yang masih kurang karena capaian kinerja yang diperoleh belum sebanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang telah digunakan. Pada indikator kondisi bangunan sekolah SMP/MTs dalam kategori baik, tingkat efisiensi tidak dapat dihitung secara langsung karena pada tahun berjalan tidak terdapat alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pencapaian indikator tersebut.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	60,57%	100,30	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	63,73%	49,68	
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,26%	67,78%	
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95,65%	39,13%	

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada sektor pendidikan dilaksanakan melalui **Program Pengelolaan Pendidikan**, yang mencakup kegiatan pengelolaan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Melalui program tersebut dilakukan berbagai upaya seperti pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan rasio ketersediaan sekolah serta perbaikan kondisi bangunan sekolah sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terus meningkat.

SASARAN STRATEGIS 5 TERCAPAINYA RASIO MINIMAL UNTUK PESERTA DIDIK TERHADAP GURU

- :
1. **MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN** : Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Rasio murid/guru (SD)	Rasio	1 : 20	1 : 101	19,80%
Rasio murid/guru (SMP)	Rasio	1 : 20	1 : 60	33,33%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, Indikator Kinerja Utama:

- a. **Rasio murid/guru (SD)**, pada tahun 2025 ditargetkan 1 : 20 namun realisasi pada tahun 2025 menunjukkan rasio **1:101**, yang berarti satu guru harus mengajar rata-rata **101 siswa**, jauh melebihi standar yang ditetapkan.

Perhitungan Rasio Murid/Guru SD :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Murid/Guru} &= \frac{\text{Jumlah Murid}}{\text{Jumlah Guru}} \\ &= \frac{58.640}{580} = 101,10 \approx 1:101 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saat ini setiap satu guru SD mengajar sekitar 101 siswa, jauh dari target ideal 1:20. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah guru SD yang tersedia saat ini, yaitu 580 orang, belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengajaran bagi 58.640 murid SD.

Capaian rasio murid/guru dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Target Rasio}}{\text{Realisasi Rasio}} \times 100\% = \text{Capaian} = \frac{20}{101} \times 100\% = 19,80\%$$

Jadi, capaian rasio murid/guru SD pada tahun 2025 adalah sekitar 19,80% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru SD masih jauh dari kebutuhan ideal.

- b. **Rasio murid/guru (SMP)**, pada tahun 2025 ditargetkan 1 : 20 namun realisasi pada tahun 2025 menunjukkan rasio **1 : 60**, yang berarti satu guru harus mengajar rata-rata **60 siswa**, jauh melebihi standar yang ditetapkan.

Perhitungan Rasio Murid/Guru SMP:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Murid/Guru} &= \frac{\text{Jumlah Murid}}{\text{Jumlah Guru}} \\ &= \frac{11.742}{196} = 59,91 \approx 1:60 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saat ini setiap satu guru SMP mengajar sekitar 60 siswa, jauh dari target ideal 1:20. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah guru SMP yang tersedia saat ini, yaitu 196 orang, belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengajaran bagi 11.742 murid SMP.

Capaian rasio murid/guru dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Target Rasio}}{\text{Realisasi Rasio}} \times 100\% = \text{Capaian} = \frac{20}{60} \times 100\% = 33,33\%$$

Jadi, capaian rasio murid/guru SMP pada tahun 2025 adalah sekitar 33,33% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru SMP masih jauh dari kebutuhan ideal.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Rasio murid/guru SD (1:101) dan SMP (1:60) saat ini masih jauh dari target ideal 1:20, sehingga diperlukan penambahan jumlah guru secara signifikan untuk mendekati target, karena jika kondisi ini tidak berubah, maka target rasio 1:20 pada akhir Renstra 2026 akan sulit tercapai tanpa upaya strategis dalam rekrutmen dan distribusi guru.

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025
Rasio murid/guru (SD)	1 : 20	1 : 101
Rasio murid/guru (SMP)	1 : 20	1 : 60

3. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kegagalan dalam mencapai target rasio murid/guru SD (1:101 dari target 1:20) dan SMP (1:60 dari target 1:20) disebabkan oleh keterbatasan rekrutmen guru, distribusi yang tidak merata, tingginya angka pertumbuhan murid yang tidak diimbangi dengan penambahan tenaga pendidik, minimnya insentif serta fasilitas bagi guru di daerah terpencil, dan kurangnya kualifikasi serta pelatihan bagi tenaga pendidik, sehingga diperlukan langkah strategis

seperti peningkatan rekrutmen, pemerataan distribusi guru, serta kebijakan insentif yang lebih baik.

Alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo untuk mengatasi permasalahan rasio murid/guru yang belum mencapai target, antara lain:

Rekrutmen Guru Baru melalui CPNS dan PPPK

- Mengusulkan formasi guru dalam seleksi CPNS dan PPPK untuk menambah jumlah tenaga pendidik.
- Mendorong perekrutan tenaga honorer daerah sebagai solusi sementara untuk mengurangi kekurangan guru.

Pemerataan Distribusi Guru

- Menugaskan kembali guru-guru yang berlebih di wilayah perkotaan ke daerah yang mengalami kekurangan guru.
- Menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk pemerataan distribusi tenaga pendidik.

Peningkatan Kesejahteraan Guru di Daerah Terpencil

- Mengupayakan tambahan insentif bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
- Memberikan bantuan transportasi dan fasilitas tempat tinggal bagi guru yang ditempatkan di daerah pedalaman.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru

- Melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran guru.
- Mendorong guru untuk mengikuti program sertifikasi guna meningkatkan profesionalisme mereka.

Optimalisasi Program Guru Kontrak Daerah

- Mempekerjakan tenaga pendidik kontrak daerah untuk mengisi kekosongan guru di beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Mitra Pendidikan

- Mengajak peran serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pengadaan tenaga pengajar sukarela.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung program pengabdian mahasiswa sebagai tenaga bantu mengajar di daerah terpencil.

Dari berbagai langkah tersebut, Dinas Pendidikan Yahukimo terus berupaya untuk mencapai target rasio murid/guru yang ideal melalui kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan guru SD dan SMP dapat dianalisis dari aspek alokasi tenaga pendidik, pemanfaatan anggaran, serta efektivitas kebijakan rekrutmen dan distribusi guru. Berdasarkan data tahun 2025, terdapat kekurangan **2.352** guru SD dan **378** guru SMP untuk mencapai target rasio murid/guru 1:20 sesuai dengan Renstra 2026.

➤ Efisiensi Alokasi Tenaga Pendidik

Saat ini, distribusi guru di Kabupaten Yahukimo masih tidak merata, dengan guru lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara di daerah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pendidik yang signifikan. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan beban kerja guru di daerah terpencil lebih berat, sehingga menghambat efektivitas pembelajaran. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan redistribusi tenaga pendidik, dengan memprioritaskan penempatan guru baru di daerah yang paling membutuhkan.

➤ Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

Anggaran pendidikan yang tersedia harus dioptimalkan untuk mendukung rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan guru, terutama bagi guru di daerah terpencil. Efisiensi anggaran dapat dicapai dengan mengalokasikan dana lebih banyak untuk program peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis

kompetensi dan penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh guna mengurangi kebutuhan tambahan guru di beberapa wilayah.

➤ Efektivitas Kebijakan Rekrutmen dan Distribusi Guru

Dalam beberapa tahun terakhir, program rekrutmen CPNS dan PPPK untuk tenaga pendidik masih belum mampu menutup kekurangan guru. Salah satu solusi yang dapat meningkatkan efisiensi adalah pengoptimalan tenaga honorer yang sudah berpengalaman di daerah setempat dengan program sertifikasi dan pengangkatan sebagai guru tetap. Selain itu, kebijakan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil perlu diperkuat agar distribusi tenaga pendidik lebih merata.

5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mengatasi kesenjangan rasio murid/guru yang masih jauh dari target, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan. Salah satu upaya utama adalah **rekrutmen dan penambahan guru**, seperti pengusulan formasi CPNS dan PPPK untuk tenaga pendidik serta perekrutan guru kontrak daerah guna mengisi kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, dilakukan **pemerataan dan redistribusi guru** melalui penempatan guru baru di daerah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar serta pemberian insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah guru SD di Kabupaten Yahukimo adalah **580 orang**, sementara jumlah murid SD mencapai **58.640 siswa**. Dengan target rasio murid/guru **1:20**, kebutuhan ideal guru SD dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan Guru SD} &= \frac{\text{Jumlah Murid SD}}{\text{Target Rasio Murid/GUru}} \\ &= \frac{58.640}{20} = 2.932 \text{ Guru} \end{aligned}$$

Saat ini terdapat kekurangan **2.352** guru SD untuk mencapai target rasio 1:20.

Sementara itu, jumlah guru SMP adalah **196 orang**, dengan jumlah murid **11.742 siswa**. Dengan target rasio murid/guru **1:20**, kebutuhan ideal guru SMP adalah:

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan Guru SMP} &= \frac{\text{Jumlah Murid SMP}}{\text{Target Rasio Murid/GURU}} \\ &= \frac{11.742}{20} = 574 \text{ Guru} \end{aligned}$$

Sehingga, terdapat **kekurangan 378 guru SMP**.

Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah daerah juga mengupayakan **peningkatan kesejahteraan dan insentif guru**, seperti pemberian tunjangan khusus bagi guru di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) serta penyediaan fasilitas pendukung, termasuk rumah dinas dan akses transportasi yang lebih baik. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi fokus utama melalui **program pelatihan dan sertifikasi**, guna meningkatkan kompetensi guru serta pemberian beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya program dan kegiatan strategis yang berkelanjutan, pencapaian target rasio murid/guru **1:20** akan sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih konkret dan terarah dalam bentuk rekrutmen, pemerataan distribusi, peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik agar target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2026 dapat tercapai.

**SASARAN STRATEGIS 6
TERWUJUDNYA PENURUNAN JUMLAH ANGKA PUTUS SEKOLAH**

:

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS

1. Pendidikan Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,10%	3,42%	2,92%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,07%	3,19%	2,19%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2025, target Angka Putus Sekolah (APS) yang ditetapkan untuk jenjang SD/MI adalah 0,10%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs adalah 0,07%. Namun, berdasarkan data realisasi, APS yang terjadi masih jauh di atas target yang ditetapkan. Perhitungan Realisasi APS Tahun 2025 dihitung menggunakan rumus:

$$APS = \frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah}}{\text{Total Jumlah Siswa}} \times 100\%$$

➤ APS SD/MI

$$APS = \frac{2.005}{58.640} \times 100\% = 3,42\%$$

Realisasi APS SD/MI: 3,42%

➤ APS SMP/MTs

$$APS = \frac{374}{11.742} \times 100\% = 3,19\%$$

Realisasi APS SMP/MTs: 3,19%

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa realisasi APS SD/MI mencapai 3,42%, yang berarti 34 kali lebih tinggi dibandingkan target yang hanya 0,10%. Sementara itu, realisasi APS SMP/MTs mencapai 3,19%, yang berarti 46 kali lebih tinggi dibandingkan target 0,07%. Perbedaan antara target dan realisasi

ini menunjukkan bahwa upaya penurunan angka putus sekolah belum berjalan secara efektif.

Tingkat pencapaian kinerja APS dihitung dengan rumus:

- Capaian APS SD/MI

$$\text{Capaian} = \frac{0,10}{3,42} \times 100\% = 2,92\%$$

- Capaian APS SMP/MTs

$$\text{Capaian} = \frac{0,07}{3,19} \times 100\% = 2,19\%$$

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian target APS SD/MI hanya **2,92%**, sedangkan SMP/MTs hanya **2,19%** dari target yang telah ditetapkan. Artinya, realisasi masih sangat jauh dari harapan, sehingga perlu strategi lebih intensif untuk menurunkan angka putus sekolah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2021 - 2026) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Terget Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01%	3,42%	0,29%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.02%	3,19%	0,63%

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Angka Putus Sekolah (APS) sampai dengan Tahun 2025 masih sangat rendah dibandingkan target

akhir Renstra 2026. APS SD/MI baru mencapai 0,29% dari target akhir, sedangkan APS SMP/MTs baru mencapai 0,63% dari target yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan angka putus sekolah masih menghadapi tantangan yang cukup besar dan memerlukan langkah percepatan serta intervensi yang lebih komprehensif agar target akhir Renstra 2026 dapat tercapai.

3. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tingkat angka putus sekolah (APS) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra, yaitu **0,10%** untuk SD/MI dan 0,07% untuk SMP/MTs. Namun, realisasi tahun 2025 menunjukkan bahwa APS SD/MI mencapai 3,42% (2.005 siswa putus sekolah) dan APS SMP/MTs sebesar 3,19% (374 siswa putus sekolah). Kegagalan dalam mencapai target ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, serta faktor sosial dan budaya.

Dari sisi ekonomi, kemiskinan menjadi penyebab utama anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena mereka harus membantu pekerjaan keluarga atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor yang menyebabkan orang tua kurang mendorong anak-anak mereka untuk tetap bersekolah. Dari aspek infrastruktur, keterbatasan fasilitas sekolah dan jauhnya jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah menyebabkan akses pendidikan menjadi sulit, terutama di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan jumlah guru dan tidak meratanya distribusi tenaga pendidik menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran, yang berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa. Kurangnya program pelatihan guru juga turut memperburuk situasi ini, sehingga banyak siswa merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal dari sekolah dan akhirnya memilih untuk

berhenti. Faktor sosial dan budaya seperti perkawinan usia dini serta mobilitas penduduk yang tinggi juga menjadi tantangan besar dalam menekan angka putus sekolah.

Dari aspek kebijakan, meskipun sudah ada berbagai program bantuan seperti beasiswa dan subsidi pendidikan, distribusinya belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kebijakan wajib belajar juga menjadi kendala dalam menekan angka putus sekolah. Dengan berbagai permasalahan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk memastikan bahwa target APS dalam Renstra 2026 dapat tercapai.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam upaya menurunkan angka putus sekolah dapat dianalisis berdasarkan alokasi anggaran, pemanfaatan tenaga pendidik, serta efektivitas program intervensi yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, meskipun berbagai program telah dijalankan untuk mendukung pendidikan, tingkat putus sekolah yang masih tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya optimal. Dari segi **alokasi anggaran**, dana pendidikan yang digunakan untuk program beasiswa, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kesejahteraan guru belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kelompok sasaran yang paling rentan mengalami putus sekolah. Selain itu, biaya operasional sekolah yang belum merata di semua wilayah menyebabkan ketimpangan dalam akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Dalam aspek **tenaga pendidik**, jumlah guru yang terbatas serta distribusi yang tidak merata menyebabkan beban kerja guru menjadi tidak seimbang. Di beberapa sekolah, rasio murid terhadap guru masih sangat tinggi, yang berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran dan kurangnya perhatian terhadap siswa yang berisiko putus sekolah. Rendahnya insentif bagi guru di daerah terpencil juga

menyebabkan kurangnya motivasi dan komitmen dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Sementara itu, dari **efektivitas program intervensi**, meskipun terdapat berbagai program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kampanye wajib belajar, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Program-program ini belum mampu secara signifikan menekan angka putus sekolah, terutama karena faktor ekonomi keluarga, kesadaran masyarakat, serta aksesibilitas sekolah yang masih menjadi tantangan utama.

Secara keseluruhan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih terarah, seperti optimalisasi distribusi anggaran, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan kebijakan intervensi yang lebih berbasis data. Dengan pendekatan yang lebih efisien, diharapkan target penurunan angka putus sekolah dalam Renstra 2026 dapat lebih realistis untuk dicapai.

5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai sasaran strategis penurunan angka putus sekolah, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Namun, efektivitasnya masih perlu dievaluasi agar benar-benar mampu mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2026. Salah satu program utama yang dijalankan adalah **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**, yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Meskipun program ini sudah berjalan, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa masih ada siswa yang mengalami putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga dan kurangnya pendampingan dalam pemanfaatan dana BOS. Selain itu, **program beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)** juga telah diberikan kepada siswa berisiko putus sekolah. Namun, cakupan program ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih mengalami kendala akses dan

administrasi dalam pengajuan bantuan. Di sisi lain, **program peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik** juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran telah dilakukan, tetapi jumlah guru yang terbatas serta distribusinya yang tidak merata menyebabkan efektivitas program ini kurang maksimal dalam menekan angka putus sekolah.

Dinas Pendidikan juga telah menginisiasi **program pendidikan inklusif dan remedial** bagi siswa yang mengalami kendala dalam menyelesaikan pendidikan. Namun, implementasi program ini masih terbatas pada sekolah tertentu, sehingga belum memberikan dampak yang luas terhadap angka putus sekolah. Secara keseluruhan, meskipun berbagai program telah berjalan, masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam perencanaan dan evaluasi program, optimalisasi distribusi anggaran, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat agar angka putus sekolah dapat ditekan secara signifikan.

**SASARAN STRATEGIS 7
TERCAPAINYA PENINGKATAN ANGKA MELANJUTKAN
LULUSAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR KE JENJANG YANG
LEBIH TINGGI**

:

1. Peningkatan Angka Melanjutkan Pendidikan **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025** **DINAS PENDIDIKAN**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,17%	85,1%	89,4%
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,35%	100,84%	102,53%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2025, target **Angka Melanjutkan (AM)** yang ditetapkan untuk jenjang **SD/MI ke SMP/MTs** adalah **95,17%**, sedangkan untuk jenjang **SMP/MTs ke ke SMA/SMK/MA.** adalah

98,35%. Namun, berdasarkan data realisasi, APS yang terjadi masih jauh di atas target yang ditetapkan. **Perhitungan Realisasi AM Tahun 2025** dihitung menggunakan formula:

a. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

- Target AM SD/MI ke SMP/MTs = 95,17%
- Jumlah Lulusan SD/MI = 3.334
- Jumlah Lulusan SD/MI yang Melanjutkan ke SMP/MTs = 2.837
- Rumus Perhitungan :

$$AMSD/MI \rightarrow SMP/MTs = \frac{\text{Jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan}}{\text{Total Lulusan SD/MI}} \times 100\%$$

$$AMSD/MI \rightarrow SMP/MTs = \frac{2.837}{3.334} \times 100\% = 85,1\%$$

Perbandingan antara target dan realisasi angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan bahwa dari target **95,17%**, realisasi yang dicapai adalah 85,1%, sehingga capaian terhadap target sebesar 89,4%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka melanjutkan cukup tinggi, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan.

b. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

- Target AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA = 98,35%
- Jumlah Lulusan SMP/MTs = 1.070
- Jumlah Lulusan SMP/MTs yang Melanjutkan ke SMA/SMK/MA = 1079
- Rumus Perhitungan :

$$ASMP/MTs \text{ ke SMA/SMK/MA} = \frac{\text{Jumlah lulusan SMP/MTs yang melanjutkan}}{\text{Total Lulusan SMP/MTs}} \times 100\%$$

$$SMP/MTs \text{ ke SMA/SMK/MA} = \frac{1.070}{1.070} \times 100\% = 100,84\%$$

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa dari target

sebesar 98,35%, realisasi yang dicapai adalah 100,84%, sehingga capaian terhadap target mencapai 102,53%. Hal ini menunjukkan bahwa angka melanjutkan telah melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas.

Capaian yang melebihi 100% ini dapat terjadi karena adanya siswa dari luar wilayah atau lulusan tahun sebelumnya yang turut melanjutkan pendidikan pada tahun berjalan, sehingga jumlah siswa yang melanjutkan lebih besar dibandingkan jumlah lulusan pada tahun yang sama.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2021 - 2026) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Renstra (%)
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95.79%	85,1%	88,83%
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98.37%	100,84%	102,51%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi **Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs** tercatat sebesar **85,1%**, sementara target akhir periode Renstra ditetapkan sebesar **95,79%**. Dengan demikian, capaian terhadap target akhir Renstra baru mencapai **88,83%**, sehingga masih terdapat **kesenjangan (gap) sebesar 10,69%** yang perlu diupayakan pencapaiannya hingga tahun 2026. di atas dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2025, realisasi angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tercatat sebesar 85,1%, sementara target akhir periode Renstra ditetapkan sebesar 95,79%, sehingga capaian terhadap target akhir baru mencapai 88,8%,

dengan gap sekitar 10,69% yang masih perlu diatasi untuk mencapai target tahun 2026.

Sementara itu, untuk indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, realisasi tahun 2025 telah mencapai 100,84%, lebih tinggi dibandingkan target akhir Renstra sebesar 98,37%. Dengan demikian, capaian terhadap target Renstra mencapai 102,51%, yang menunjukkan bahwa indikator ini telah melampaui target jangka menengah sebelum akhir periode Renstra.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi peserta didik dari jenjang pendidikan menengah pertama ke jenjang menengah atas telah berjalan dengan baik, sementara transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama masih perlu ditingkatkan.

3. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan dalam mencapai target angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dapat dianalisis dari beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi kendala, di mana jarak sekolah yang jauh serta minimnya sarana transportasi menyebabkan banyak lulusan SD/MI tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kedua, faktor ekonomi keluarga berperan besar, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah yang lebih memilih anak-anak mereka untuk bekerja atau membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah. Ketiga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menengah pertama masih menjadi tantangan, terutama di beberapa komunitas yang masih menganggap pendidikan dasar sudah cukup. Selain itu, ketersediaan sekolah menengah pertama yang terbatas di beberapa wilayah juga menjadi penyebab, mengingat tidak semua distrik memiliki SMP/MTs yang cukup untuk menampung lulusan SD/MI. Kurangnya program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu juga menjadi faktor yang

menghambat peningkatan angka melanjutkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti pembangunan sekolah baru, peningkatan akses transportasi, pemberian bantuan pendidikan, serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pendidikan menengah pertama.

Untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo telah melakukan beberapa alternatif solusi. Pertama, pemerintah telah mendorong pembangunan dan rehabilitasi sekolah menengah pertama di daerah yang memiliki keterbatasan akses, terutama di wilayah terpencil. Kedua, program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu terus ditingkatkan untuk meringankan beban ekonomi keluarga agar anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah pertama telah dilakukan secara intensif melalui berbagai program penyuluhan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Keempat, Dinas Pendidikan juga telah mengembangkan skema transportasi atau penyediaan asrama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah untuk mengatasi kendala geografis. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah, terus dilakukan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Yahukimo. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka melanjutkan dapat terus meningkat dan mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana telah dimanfaatkan secara optimal. Dari segi anggaran, program beasiswa dan bantuan

pendidikan telah disalurkan untuk mendukung siswa kurang mampu, namun masih perlu dievaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Selain itu, pemanfaatan tenaga pendidik belum sepenuhnya efisien, mengingat masih terdapat ketimpangan distribusi guru antara daerah perkotaan dan terpencil, yang berdampak pada keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah. Dari sisi infrastruktur, pembangunan sekolah dan penyediaan asrama bagi siswa di daerah terpencil telah dilakukan, tetapi ketersediaan fasilitas belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan masih perlu ditingkatkan. Efisiensi juga dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sistem transportasi sekolah, terutama bagi siswa yang harus menempuh jarak jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya peningkatan akses pendidikan, efektivitas penggunaan sumber daya masih perlu diperbaiki agar hasil yang dicapai lebih optimal dan sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs serta dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa beberapa inisiatif telah dijalankan untuk mendukung transisi siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program beasiswa bagi siswa kurang mampu menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong kelanjutan pendidikan, terutama bagi mereka yang mengalami kendala ekonomi. Selain itu, program bimbingan dan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan lanjutan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Di sisi infrastruktur, pembangunan sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti asrama dan transportasi

sekolah telah membantu meningkatkan akses bagi siswa di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menerapkan kebijakan afirmasi bagi siswa dari kelompok rentan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terisolasi, dengan memberikan dukungan khusus agar mereka dapat melanjutkan pendidikan.

Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi, terutama terkait pemerataan distribusi fasilitas dan tenaga pendidik agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Dengan optimalisasi dan peningkatan program yang sudah berjalan, diharapkan angka melanjutkan siswa dapat lebih mendekati target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

**SASARAN STRATEGIS 8
TERCAPAINYA PENINGKATAN KAPASITAS DAN
PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS

Pendidikan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	43,26%	43,26%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, jumlah guru PNS yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV saat ini sebanyak **199 orang**, dari total **460 guru PNS** yang ada. Target yang ditetapkan dalam Renstra adalah **100% guru PNS berkualifikasi S1/D-IV**, sehingga capaian kinerja dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{Guru PNS berkualifikasi S. 1/D. IV}}{\Sigma \text{Guru PNS}} \times 100\%$$

$$\frac{199}{460} \times 100\%$$

$$= 43,26\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa capaian kualifikasi guru saat ini baru mencapai **43,26%** dari target 100%, yang berarti masih terdapat kekurangan sebesar **56,74%** atau sekitar **261 guru** yang belum memiliki kualifikasi S1/D-IV.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2024) disajikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi		Tingkat Pertumbuhan Kinerja
		Th. 2024	Th. 2025	
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100	85.35%	43.26%	-49,31%

$$\begin{aligned}
 \text{Tkt. Pertumbuhan Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2025} - \text{Realisasi Tahun Lalu}}{\Sigma \text{Guru PNS}} \times 100\% \\
 &= \frac{43,26 - 85,35}{85,35} \times 100\% = -49,31\%
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2024) sebesar 85,35%, maka capaian kinerja tahun 2025 sebesar 43,26% menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Tingkat pertumbuhan kinerja tercatat sebesar -49,31%, yang mengindikasikan adanya penurunan capaian indikator secara drastis.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2021 - 2026) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Terget Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100%	43.26%	43,26%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2025 mencapai 43,26%, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian kinerja hingga tahun 2025 baru mencapai 43,26% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja masih jauh dari target akhir Renstra, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam kurun waktu yang tersisa hingga tahun 2026. Rendahnya tingkat kemajuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualifikasi akademik guru belum berjalan secara optimal, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan lanjutan, keterbatasan program peningkatan kualifikasi, serta faktor usia dan masa kerja guru.

Untuk mencapai target 100% guru berkualifikasi S1/D-IV pada tahun berikut, diperlukan langkah percepatan, antara lain:

- Peningkatan program peningkatan kualifikasi akademik guru
- Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan lanjutan
- Pemberian dukungan pembiayaan atau beasiswa bagi guru
- Pemetaan guru yang belum memenuhi kualifikasi untuk intervensi yang lebih terarah

4. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Belum tercapainya target indikator **persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV** pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar **43,26% dari target 100%**, menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia di sektor pendidikan masih menghadapi berbagai kendala.

1. Masih rendahnya kualifikasi akademik guru

Sebagian guru PNS masih memiliki kualifikasi di bawah S1/D-IV sehingga belum memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan.

2. Keterbatasan akses pendidikan lanjutan

Letak geografis dan keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi menjadi kendala bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Keterbatasan program dan dukungan pembiayaan

Program peningkatan kualifikasi akademik seperti beasiswa atau tugas belajar masih terbatas, sehingga belum mampu menjangkau seluruh guru yang membutuhkan.

4. Faktor usia dan masa kerja guru

Sebagian guru mendekati masa pensiun sehingga tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D-IV.

5. Pemutakhiran dan validasi data

Perbedaan dan pemutakhiran data guru pada tahun 2025 menyebabkan perubahan capaian yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam upaya peningkatan kualifikasi akademik guru pada tahun 2025 belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari capaian indikator **persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV** yang baru mencapai **43,26%** dari target **100%**, sehingga masih terdapat kesenjangan yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan.

Dari sisi **sumber daya anggaran**, alokasi yang tersedia untuk program peningkatan kualifikasi guru masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh guru yang belum memenuhi kualifikasi. Sebagian besar anggaran masih difokuskan pada kegiatan operasional pendidikan dan peningkatan kompetensi jangka pendek, seperti pelatihan dan workshop, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kualifikasi formal (S1/D-IV) belum signifikan.

Dari sisi **sumber daya manusia**, belum optimalnya pemanfaatan potensi guru dalam mengikuti program pendidikan lanjutan juga menjadi kendala. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia, motivasi, serta keterbatasan waktu dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, dari sisi **sarana dan akses pendidikan**, keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi, khususnya di wilayah Kabupaten Yahukimo, turut mempengaruhi efisiensi pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru. Kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas pendidikan tinggi menyebabkan biaya dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih besar.

Meskipun demikian, Dinas Pendidikan telah berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui:

- **Pemetaan kebutuhan peningkatan kualifikasi guru** secara lebih terarah
- **Prioritas pemberian kesempatan belajar** kepada guru yang masih aktif dan memiliki masa kerja panjang
- **Pemanfaatan kerja sama dengan perguruan tinggi** untuk membuka akses pendidikan lanjutan
- **Optimalisasi program pelatihan sebagai langkah antara** dalam meningkatkan kompetensi guru

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan penggunaan sumber daya ke depan dapat lebih **efektif dan tepat sasaran**, sehingga mampu mempercepat peningkatan kualifikasi akademik guru dan mendukung pencapaian target Renstra.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk meningkatkan jumlah guru PNS yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sesuai dengan target Renstra, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Program-program ini berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi guru, pengembangan kompetensi, serta dukungan insentif guna mempercepat pencapaian target. Salah satu program utama yang telah berjalan adalah program beasiswa atau

bantuan studi lanjut bagi guru. Program ini memberikan kesempatan kepada guru yang belum memiliki gelar S1/D-IV untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi tanpa terbebani oleh biaya pendidikan yang tinggi. Beberapa beasiswa ini juga mencakup tunjangan tambahan bagi guru yang berada di daerah terpencil, sehingga mereka tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan lebih mudah. Selain itu, program pendidikan jarak jauh (PJJ) dan kelas karyawan juga telah diterapkan sebagai solusi bagi guru yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti perkuliahan secara penuh. Dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, para guru dapat tetap menjalankan tugas mengajar sambil menyelesaikan pendidikan mereka. Program ini terbukti cukup efektif dalam meningkatkan angka partisipasi guru dalam pendidikan lanjutan.

Dinas pendidikan juga telah menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi guru yang sudah memiliki gelar S1/D-IV guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas pengajaran mereka. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti metode pembelajaran inovatif, teknologi pendidikan, serta strategi pengelolaan kelas yang efektif. Dengan adanya pelatihan ini, guru tidak hanya memenuhi kualifikasi formal tetapi juga memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mendidik siswa. Untuk mendorong lebih banyak guru agar melanjutkan pendidikan, pemerintah daerah juga telah menerapkan kebijakan insentif bagi guru yang berhasil menyelesaikan pendidikan S1/D-IV. Insentif ini bisa berupa kenaikan tunjangan profesi, prioritas dalam promosi jabatan, atau pengakuan tambahan dalam sistem kenaikan pangkat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan motivasi lebih kepada para guru agar segera menyelesaikan pendidikan mereka.

Meskipun berbagai program dan kegiatan telah menunjukkan hasil yang positif dengan peningkatan angka guru berkualifikasi S1/D-IV hingga 85,35% pada tahun 2024, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya,

seperti keterbatasan akses ke perguruan tinggi di daerah terpencil, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi mengenai program pendidikan lanjutan bagi guru. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan efektivitas program yang ada agar target 100% kualifikasi guru S1/D-IV dapat tercapai sesuai dengan akhir periode Renstra.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 302,627,757,998 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan Capaian per program, adapun realisasi anggaran disajikan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	(%)
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA	302.627.757.998,00	151.836.220.145,00	150.791.537.853,00	150.791.537.853,00	50,17
5.1.	BELANJA OPERASI	279.458.100.782,00	136.840.190.145,00	142.617.910.637,00	142.617.910.637,00	48,97
5.1.01.	Belanja Pegawai	89.605.275.512,00	75.553.170.145,00	14.052.105.367,00	14.052.105.367,00	84,32
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.302.825.270,00	38.337.020.000,00	123.965.805.270,00	123.965.805.270,00	23,62
5.1.05.	Belanja Hibah	27.550.000.000,00	22.950.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	83,30
5.2.	BELANJA MODAL	23.169.657.216,00	14.996.030.000,00	8.173.627.216,00	8.173.627.216,00	64,72
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.999.143.700,00	1.276.095.000,00	4.723.048.700,00	4.723.048.700,00	21,27
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.087.263.516,00	13.636.685.000,00	3.450.578.516,00	3.450.578.516,00	79,81
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	83.250.000,00	83.250.000,00	-	-	100,00
	JUMLAH	302.627.757.998,00	151.836.220.145,00	150.791.537.853,00	150.791.537.853,00	50,17
	SURPLUS/(DEFISIT)	(302.627.757.998,00)	(151.836.220.145,00)	(150.791.537.853,00)	(150.791.537.853,00)	50,17

Dari tabel diatas terlihat bahwa Capaian anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 terserap sebesar Rp 151,836,220,145 atau 50.17% dari total anggaran Rp 302,627,757,998.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo 2021- 2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo pada tahun-tahun mendatang.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, melalui pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan dan diseminasi;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja Perangkat Daerah;

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021–2026 dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan.

Demikian penyampaian Laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah secara umum senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Sumohai, 18 Maret 2026



PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

AKSO BALINGGA, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19760320 200312 1006

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Dekai - Sumohai

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 420/ 17/ DISPEND/ YHK/ 2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 01)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
 - b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai,

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO



[Handwritten Signature]

AKSO BALINGGA, S.Pd
Pembina
NIP. 19760320 200312 1006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Yahukimo di Sumohai;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 420/ / DISPEND/ YHK/ 2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026**

- 1 Nama Organisasi : Dinas Pendidikan
- 2 Tugas, Pokok dan Fungsi : Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, sebagaimana menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan;
 - e. Pengelolaan administrasi dinas di bidang Pendidikan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Sekretariat	Dinas Pendidikan
2.	Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\Sigma \text{lulusan siswa SD/MI}}{\Sigma \text{siswa SD/MI yang ikut ujian}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\Sigma \text{lulusan siswa SMP/MTs}}{\Sigma \text{siswa SMP/MTs yang ikut ujian}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa PAUD}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 5 - 6 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pemb. PAUD & Pend. Non Formal	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa jenjang SD/MI/Paket A}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa jenjang SMP/MTs/ Paket B}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\Sigma \text{ siswa usia 7 - 12 tahun jenjang SD/MI/Paket A}}{\Sigma \text{ Penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\Sigma \text{ siswa usia 13 - 15 tahun jenjang SMP/MTs/ Paket B}}{\Sigma \text{ Penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa jenjang SD/MI}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 1	$\frac{\Sigma \text{ seluruh siswa jenjang SMP/MTs}}{\Sigma \text{ Penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	$\frac{\Sigma \text{ Sekolah Dasar}}{\Sigma \text{ Penduduk usia Pendidikan SD}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	$\frac{\Sigma \text{ SMP}}{\Sigma \text{ Penduduk usia Pendidikan SMP}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\Sigma \text{ SD/MI dengan kondisi bangunan baik}}{\Sigma \text{ SD/MI}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	$\frac{\Sigma \text{ SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik}}{\Sigma \text{ SMP/MTs}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan
5	Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Rasio murid/guru (SD)	RGS : Jumlah Guru pada Pendidikan SD per jumlah siswa SD	Bidang Ketenagaan	Dinas Pendidikan
		Rasio murid/guru (SMP)	RGS : Jumlah Guru pada Pendidikan SMP per jumlah siswa SMP	Bidang Ketenagaan	Dinas Pendidikan
6.	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\Sigma \text{ siswa putus sekolah jenjang SD/MI}}{\Sigma \text{ siswa jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\Sigma \text{ siswa putus sekolah jenjang SMP/MTs}}{\Sigma \text{ siswa jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan
7.	Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\Sigma \text{ lulusan SD/ MI yang melanjutkan ke SMP/MTs}}{\Sigma \text{ lulusan SD/MI}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Pemb. SD	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\Sigma \text{ lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA}}{\Sigma \text{ lulusan SMP/MTs}} \times 100\%$	Bidang Pemb. SMP	Dinas Pendidikan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
8.	Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\Sigma \text{ Guru PNS berkualifikasi S. 1/D. IV}}{\Sigma \text{ Guru PNS}} \times 100\%$	Bidang Ketenagaan	Dinas Pendidikan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya					
9.	Meratanya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Bidang pada Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
10.	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan dalam bermasyarakat dan kebudayaan kehidupan	Persentase Muatan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	$\frac{\text{Kegiatan dengan nilai muatan lokal}}{\text{keseluruhan kegiatan pendidikan}} \times 100\%$		

Sumohai, 17 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO



AKSO BALINGGA, S.Pd

Pembina

NIP. 19760320 200312 1006



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Dekai - Sumohai

RENCANA KERJA (RKT) TAHUN 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Predikat	B (65)
2.	Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
3.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	76,19
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	%	103,32
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	%	103,75
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15	%	100
4.	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	%	60,57
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	%	63,73
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,26
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	95,65
5.	Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Rasio murid/guru (SD)	rasio	1 ; 20
		Rasio murid/guru (SMP)	rasio	1 ; 20
6.	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,10
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,07
7.	Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,17
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,35
8.	Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100

9.	Meratanya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	4,07
10.	Meningkatnya efektivitas dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	%	100

Sumohai, 12 November 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO



AKSO BALINGGA, S.Pd

Pembina

NIP. 19760320 200312 1006



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Dekai - Sumohai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKSO BALINGGA, S.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIDIMUS YAHULI, SH
Jabatan : BUPATI YAHUKIMO

selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumohai, 10 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI YAHUKIMO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DIDIMUS YAHULI, SH., MH

AKSO BALINGGA, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760320 200312 1006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Predikat	B (65)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.470.000
2.	Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	500.000.000
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	-	-
3.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	76.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6.903.927.114 41.550.000
					2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	307.500.000
					3. Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.477.168.000
					4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	105.000.000
					5. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	561.334.000
					6. Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.111.375.114
					7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	300.000.000
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	%	103.32	-	-
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	%	103.75	-	-
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.843.510.000 83.353.510.000		
				2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.490.000.000	

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan:	25.279.051.800
					1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	382.500.000,00
					2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24.896.551.800
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	100	-	-
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	%	100	-	-
4.	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	%	60.57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan:	17.134.643.312
					1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	723.611.400
					2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	616.035.380
					3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.850.656.532
					4. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.485.000.000
					5. Pembangunan Ruang Kelas Baru	10.459.340.000
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	%	63.73	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan:	563.000.000
					1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	365.000.000
					2. Pembangunan Ruang Kelas Baru	198.000.000
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94.26
				1. Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	95.65		
5.	Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Rasio murid/guru (SD)	rasio	1 ; 20	-	-
		Rasio murid/guru (SMP)	rasio	1 ; 20	-	-
6.	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,10	-	-
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,07	-	-

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
7.	Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,17	-	-
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,35	-	-
8.	Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan	650.000.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan:	2.641.717.716
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.691.717.716
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	350.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan:	1.500.000.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan:	1.665.587.054
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.365.587.054
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	300.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan:	350.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	150.000.000					
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	200.000.000					

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
9.	Meratanya akses pendidikan	Rata-Rata Sekolah Lama	Tahun	4.07	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.450.000.000
					Kegiatan : Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan : Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	16.250.000.000
					Kegiatan: Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	19.200.000.000
10.	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	%	100	-	-
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						184.667.906.996

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah:

Program:	Anggaran :	Sumber Dana :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.381.859.000	APBD
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	192.822.482.486	APBD
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	19.200.000.000	APBD
Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama dan Rutin) Rp.	302.404.341.486	APBD

Sumohai, 10 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI YAHUKIMO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DIDIMUS YAHULI, SH.,MH

AKSO BALINGGA, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760320 200312 1006